

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kota Gorontalo terletak pada kriteria yang sangat baik, artinya bahwa pengawasan fungsional telah dilakukan sesuai dengan standar GBHN dan kebijakan pengawasan fungsional, dengan skor tertinggi dalam variabel terletak pada indikator standar koordinasi dan mutu sedangkan skor terendah terletak pada indikator pelaporan. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap pelaporan atas pemeriksaan maupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat bagi terciptanya Kinerja Pemerintah yang baik.
2. Kinerja seseorang dipenuhi oleh kecakapan, keterampilan, kesungguhan dan lingkungan kerja itu sendiri. Adapun hasil jawaban responden bahwa Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo terletak pada kriteria yang baik, hasil ini menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota telah dilakukan dengan hasil yang baik terutama dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui kegiatan atau program yang dibuat.

3. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah pada kantor Inspektorat Kota Gorontalo dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 56,5%. Hal ini terlihat dari nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  baik pada taraf signifikan  $\alpha$  sebesar 5%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional hendaknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ada, prosedur yang harus dilakukan yakni dengan mengacu pada Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintahan (SA-APFP) yakni Standar Umum, Standar Koordinasi dan Kendali Mutu, Standar Pelaksanaan, Standar Pelaporan, dan Standar Koordinasi. selain itu perlu dilakukan monitoring agar bisa berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Dan saling berkoordinasi antar aparat pengawas agar kinerja dapat berjalan sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab.
2. Bagi pemerintah kota agar dapat mengurangi atau meminimalisir penggunaan dana, sehingga dapat selaras dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan cara di ikut sertakan dalam

pelatihan yang berhubungan dengan profesi, dan ditempatkan pada bidang keahlian yang tepat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menggunakan variabel lain yang lebih spesifik untuk mengukur Pengawasan Fungsional dan Kinerja Pemerintah. Dikarenakan hasil penelitian yang diperoleh 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Ardiansyah, Andika. 2010. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, *Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset Kota Gorontalo*. Diakses melalui <http://www.gorontalo.bpk.go.id> pada 26 desember 2014
- BPKP No. KEP-378/K/2004 tanggal 30 mei 2004 tentang penetapan berlakunya Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Efendy, M Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Undip.
- Elena I. Danilina. 2014. *The Integrated Assessment Of The Local Government Activity Using The Sysmtem Of Indicators*. American. Journal of Applied Sciences Vol.11 Issue 8. AJAS.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP
- Gouzali Saydam. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Djambaran
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Harun, Al-Rasyid. 1993. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.

[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=7849&Itemid](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7849&Itemid) (Tuesday, Jun 24, 2014, 12:04:57 PM)

Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
<http://www.esdm.go.id/prokum/keppres/2001/keppres-74-2001.pdf>  
(Tuesday, Jun 24, 2014, 12:25:57 PM)

Lamatenggo, Moh. Bahrunsyah. 2011. "Faktor-Faktor Kompetensi Aparatur Inspektorat dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanudin

Mahsun, Mohamad. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Narimawati, Umi. 2007. *Riset Manajemen SDM*. Jakarta: Agung Media.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Peran dan Fungsi Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pengawasan

Rahmawati, Sitti. 2014. "Pengaruh Pengawasan Fungsional Inspektorat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato". *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo

Rai I, Gusti. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan Dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Bandung. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Volume 10, Nomor 2. Halaman 101-111.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business: "Metodologi Penelitian Untuk Bisnis"* Edisi 4. Jakarta: Salemba empat

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA

- Suharso, Puguh. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: pendekatan filosofi dan praktis*. Jakarta Barat: PT INDEKS
- Sukmana, Wawan dan Anggarsari, Lia. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya*. Siliwangi. *Jurnal Akuntansi FE*, Volume 4, Nomor 1, Hal 577-584
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
[http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_32\\_2004\\_Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf) (Tuesday, Jun 24, 2014, 12:10:57 PM)
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wulandari, Indah. 2009. "Pengaruh Pengawasan Fungsional dalam menunjang Akuntabilitas Publik pada pemerintahan Kota Padang". *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.